Sultra *Journal of Political Science*

Volume 1 Nomor 1, April 2019
Publisher: ***Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Tenggara***
Indexed by: ***Google Scholar***
E-Journal Homepage: http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sjps

Pengelolaan Organisasi dalam Pengentasan Kemiskinan \di Kota Kendari

Joko Tri Brata
Email: joko_tribrata@yahoo.co.id
Universitas Sulawesi Tenggara

Abstract

Poverty Reduction is a Policy Model, where parties involved in poverty reduction organizations are always only in the context of formal "Institutional Settings" so that in the context of organizational effectiveness, their governance needs to be elaborated. The research objective is to describe the form of implementation of the Poverty Alleviation Program at Kendari City Level. The research method is to display the phenomenon of organizational management by referring to the main tasks and functions of the field related to poverty alleviation. The results of this study describe the concept of organizational management in the eradication of the Ministry of Education and Culture in the city of Kendari in the form of a governance model by dividing the task of working groups specifically dealing with the field of Data Collection and Information Systems; the field of partnership development and the field of public complaints. To reduce organizational problems, in the form of program control teams namely; Controller of the Social Protection and Assistance Program; Control of Community Empowerment Programs and Controllers of Micro and Small Business Empowerment Programs. The results of the study also recommend the need for institutional redesign of integrated poverty reduction organizations, so that the management of organizations in the prevention of poverty is more efficient

Keywords: *Management; Poverty Alleviation*

Pendahuluan

Merujuk Pandangan Goldsmith, Tribrata (2013) menerangkan bahwa keuntungan dari model jaringan adalah dengan adanya "spesialisasi, inovasi, kecepatan dan fleksibilitas, serta peningkatan jangkauan". Titik berat Inovasi adalah dengan menolaborasi satuan dalam satuan organisasi sehingga tercipta suatu satuan baru yang lebih modern dan fleksibel. Dalam konteks jaringan, disebutkan bahwa aktifitas para pihak dalam jaringan organisasi berkaitan dengan implementasi program sangatlah bermanfaat, dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama.

Berkaitan dengan konsep itu, dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan ternyata belum berdampak besar dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Hal ini membuat dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia. Khususnya di Sulawesi Tenggara, angka kemiskinan masih

berkisar di tataram 12%. Hal ini memaksa Pemerintah daerah .perlu membuat sebuah kebijakan alternatif dalam hal menanggulanggi kemiskinan didaerahnya.

Berkaitan dengan konsep diatas, dalam konstelasi perencanaan, Sulistianingrum (2013) mengemukakan bahwa tidak optimalnya perencanaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia karena ; (1) menyangkut **ketidaktepatan sasaran**, **ketidakpaduan lokasi dan waktu**, dan **koordinasi** antar program/kegiatan maupun program/kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang belum selaras, (2) peran dan kapasitas organisasi pengelaola belum optimal, juga karena (3) pemekaran wilayah **yang terus menerus** menyulitkan dalam perencanaan dan penganggaran termasuk kebijakan kemiskinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong tipe penelitian deskripsi, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yang menggambarkan fenomena (Moeloeng, 2004) dan berupaya untu mengkombinasi dengan melihat deskripsi penanganan kemiskinan di bidang bidang yang lain.

Menjawab tujuan penelitia yang berkaitan dengan deskripsi peneliti akan melakukan analisa secara kualitatif, dengan mendeskripsikan berdasarkan bahan bahan dokumentasi hasil hasil penelitian terdahulu dan menjawab permasalahan dengan metode Triagulasi.

Deskripsi Organisasi Penanggulangan Kemiskinan

Organisasi penanggulangan kemiskinan Kota kendari, digambarkan dalam bentuk struktur organisasi yang secara herarki dijabarkan dari organisasi penanggulangan kemiskinan tingkat pusat, tingkat Propinsi Sulawesi Tenggara dan tingkat Kota Kendari.

Dalam Skema Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Kendari disusun berdasarkan Format dasar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TKPKN), dimana TKPKD di serahkan tugas untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Kendari.

Penerapan peran, tugas dan fungsi TKPKD Di Kota Kendari, direalisasikan dengan berdasar pada Dokumen Strategi Daerah Penanggulangan Kemiskinan (SDPK), dokumen ini menjadi acuan bersama dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Kendari. Hasil Analisa dokumen dan pengamanatan mengemukakan bahwa gambaran Organisasi penanggulangan kemiskinan di Kota Kendari yang tergabung dalam TKPKD bukan merupakan suatu kerangka jaringan yang baik, tetapi hanya sebuah "Setting Institusional" yang bersifat formal karena bentuknya masih cenderung herarki dan belum mepunyai inovasi dari ketentuan yang ada (Tribrata, 2015).

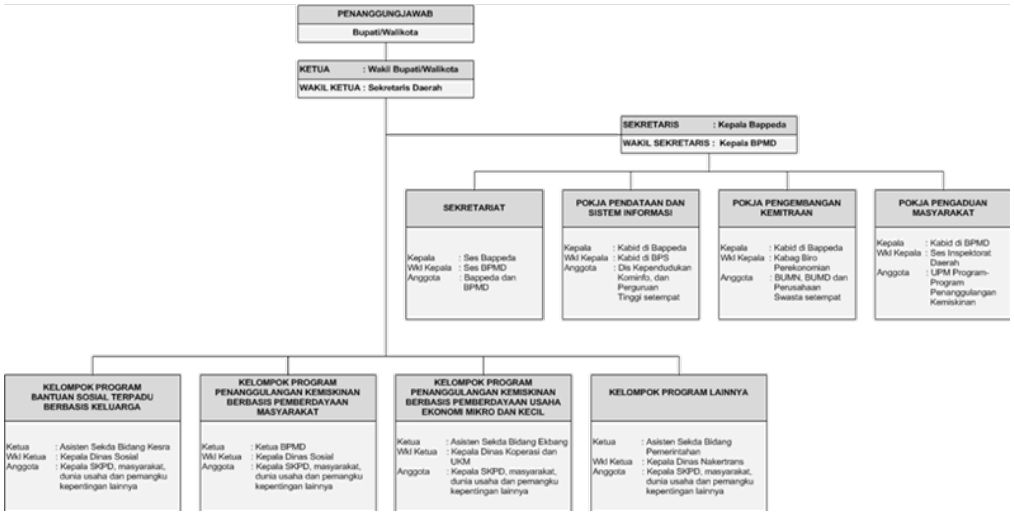

Gambar 1. Skema TNPPK tingkat Kota Kendari

Pembahasan

1. Pembahasan Umum Pengelolaan Organisasi

Tribrata (2015) menemukan bahwa TKPKD adalah sebuah *"Setting Institusional"*, sehingga memberikan gambaran bahwa berkaitan dengan itu, analisa model pengelolaan ini, dikembangkan dalam sebuah setting antar lembaga terkait dalam sebuah model teintegrasi (jaringan) karena salah satu yang menjadi fokus keberhasilan organisasi adalah dengan penguatan organisasi terintegrasi (bahasa lain jaringan) yang merupakan kunci utama dalam pengembangan organiasi, seperti pada Skema berikut ini.

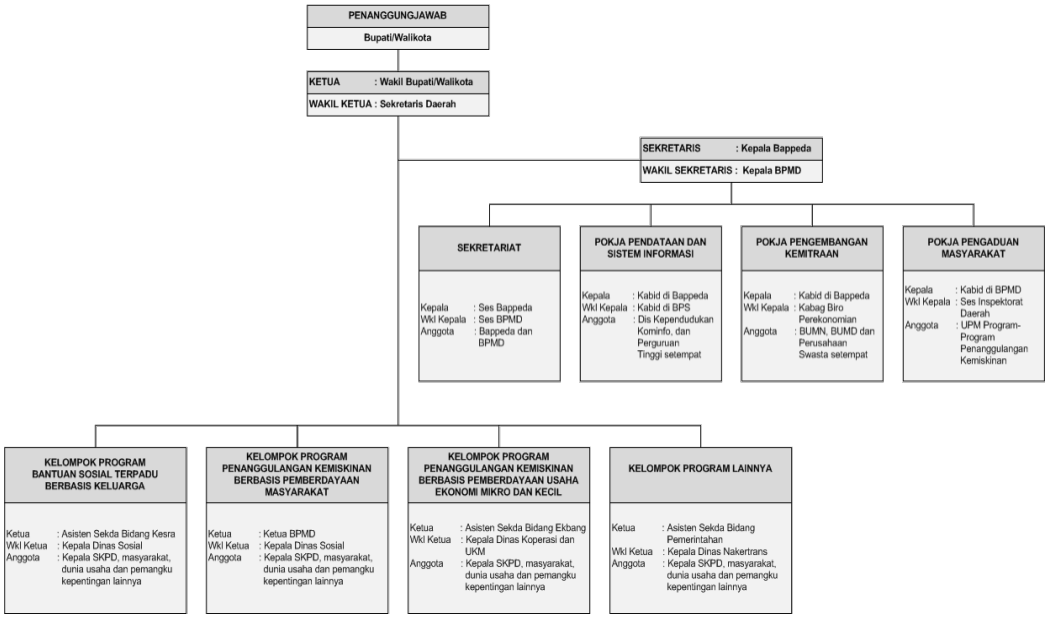

Gambar 2. Skema TNPPK Kota Kendari
Sumber ; Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi penanggulangan Kemiskinan

Gambaran tentang model jaringan, dikemukakan *Goldsmith* (2009) yang mengemukakan bahwa keuntungan dari model jaringan adalah dengan adanya **spesialisasi, inovasi, kecepatan** dan **fleksibilitas,** serta p**eningkatan jangkauan**. Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota kendari, dibentuk dengan Keputusan Walikota yang merujuk pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 yang kemudian disempurnakan lagi melalui Perpres Nomor 13 Tahun serta perubahan terakhir dengan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Keanggotaan TKPKD Kota Kendari terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, dengan susunan komposisi secara lengkap sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Kendari

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA
I.	Penanggung Jawab	Walikota Kendari
II.	Ketua	Wakil Walikota Kendari
	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kota Kendari
III.	Sekretaris	Kepala Bappeda dan PM
	Wakil Sekretaris	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan
IV.	Sekretariat	
	• Kepala	Sekretaris Bappeda
	• Wakil Kepala	Sekretaris BPM Kota Kendari
	• Anggota	1. Semua Kepala Bidang di Bappeda dan PM 2. Semua Kabag di Dinas Pemberdayaan Masayarakat. 3. Kabag yang masuk dalam program pengentasan kemskinan Lingkup Kota Kendari
V.	Kelompok Kerja 1. Pendataan dan Informasi	
	• Ketua	Kepala Bidang. Litbang dan Statistik Bappeda
	• Wakil Ketua	Kepala BPS Kota Kendari
	• Anggota	1. Kepala LPPM perguruan tinggi lingkup Kota Kendari 2. Kabag. Adm Humas dan Kemasyarakatan Setda Kota Kendari 3. Kabid. Data dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Capil Kota Kendari 4. Kasubid. Statistik, Monitoring, dan Evaluasi Bappeda 5. Kasubid. Litbang dan Kerjasama Bappeda

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA
	2. Pengembangan Kemitraan	
	• Ketua	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda
	• Wakil Ketua	Kabag. Administrasi Perekonomian Setda
	• Anggota	1. Kasubid. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Bappeda 2. Kasubid. Pengemb. Investasi dan Penanaman Modal Bappeda
	3. Pengaduan Masyarakat	
	• Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Kendari
	• Wakil Ketua	Kabid. Sosbud BPM Kota Kendari
	• Anggota	**1.** Inspektur Wilayah I,II,III, dan IV Inspektorat **2.** Kasi. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Bappeda Kota Kendari
VI.	Kelompok Program	
	1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga	
	• Ketua	Asisten Tata Praja dan Kesra. (Asisten I)
	• Wakil Ketua	Kepala Dinas Nakertransos
	• Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Dinas Pendidikan 3. Kepala Badan Kesbangpol 4. Kadis Kependudukan dan Capil 5. Kabag. Kesra Setda Kota Kendari 6. Ketua Lembaga Pelayanan Masyarakat Madani (LPM2) Kota Kendari
	2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	
	• Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
	• Wakil Ketua	Kepala Dinas PU Kota Kendari
	• Anggota	1. Kepala Dinas Pemuda,Kebudayaan dan Pariwisata 2. Kepala Dinas Kebersihan 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 4. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan 5. Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah 6. Kabid. Fispra Bappeda 7. Korkot KOTAKU Kota Kendari 8. Koordinator BKM Se Kota Kendari 9. Ketua Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Kota Kendari
	3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil	
	• Ketua	Asisten Administrasi Pembangunan (Asisten II)
	• Wakil Ketua	Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM
	• Anggota	1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Kepala BP4K Kota Kendari 3. Kepala DPPAD Kota Kendari 4. Kepala BPKD Kota Kendari 5. Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Kota Kendari

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA
		6. Pimpinan PINMBUK/BMT Kota Kendari 7. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Ekuator Kota Kendari
	4. Sarana/Prasarana Fisik dan Lingkungan	
	• Ketua	Asisten Administrasi Umum (Asisten III)
	• Wakil Ketua	Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan
	• Anggota	1. Kepala Badan Lingkungan Hidup 2. Kepala Inspektorat 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil. 4. Kepala Dinas Perhubungan 5. Kepala Badan Penyelenggara Perizinan 6. Ketua REI Kota Kendari

Sumber Data : Sekertariat TKPKD Kota Kendari

2. Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Kendari adalah mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Kendari, diuraikan masing-masing fungsi sebagai berikut ;

1. Dalam rangka tugas koordinasi kebijakan dan program, TKPKD Kota Kendari menyelenggarakan fungsi :
   a. Koordinasi Penyusunan SKPD Kota Kendari sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Kendari di bidang penanggulangan kemiskinan.
   b. Koordinasi forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Renstra SKPD.
   c. Koordinasi forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan SKPD.
   d. Koordinasi forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Renja SKPD, dan
   e. Evaluasi terhadap pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan program, TKPK Kota Kendari menyelenggarakan fungsi :
   a. Koordinasi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap penyampaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai kebijakan pembangunan daerah.
   b. Koordinasi pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
   c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara regular.
   d. Koordinasi evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.

e. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan.

Di Kota Kendari, peran dan fungsi tersebut direalisasikan melalui penyusunan dokumen Strategi Daerah Penanggulangan Kemiskinan (SDPK), dokumen ini menjadi acuan bersama dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Kendari.

3. Pelaksanaan Tugas Organisasi Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan tugas sekretariat TKPKD Kota Kendari yang dalam rangka memudahkan pelekasnaan kerja, maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan dan Sistem Informasi, Pokja Pengembangan Kemitraan dan Pokja Pengaduan Masyarakat. Adapun tugas masing-masing Pokja adalah sebagai berikut :

(1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi
   a. Perumusan indikator pendataan kemiskinan
   b. Penyusunan sistem informasi kemiskinan
   c. Penyediaan data dan in formasi sistem peringatan dini, kondisi dan permasalahan kemiskinan.

(2) Kelompok kerja pengembangan kemitraan
   a. Pemberian fasilitas hubungan TKPK Nasional, TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota
   b. Pemberian fasilitas pembentukan Kabupaten/Kota
   c. Pemberian fasilitas hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat

(3) Kelompok kerja penanggulangan pengaduan masyarakat
   a. Penyelenggaraan koordinasi penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan skala nasional dan daerah.
   b. Penyelenggaraan kampanye agar masyarakat berani menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
   c. Pelaksanaan supervisi kepada UPM Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dalam mengelola penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat.
   d. Penyelenggaraan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Untuk membantu Tugas Pengendalian Program atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, maka juga dibentuk Tim Pengendali Pelaksana Program yang memberikan dukungan monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan serta bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kota Kendari, dan Tim Pengendali Pelaksana Program ini terdiri dari :

(1) Pengendali Kelompok Program Perlindungan dan Bantuan Sosial;
(2) Pengendali Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat, dan
(3) Pengendali Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Adapun tugas masing-masing Tim Pengendali Kelompok Program adalah sebagai berikut :

(1) Tim Pengendali Kelompok Program Perlindungan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program perlindungan dan bantuan sosial.
(2) Tim Pengendali Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksana program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan masyarakat.
(3) Tim Pengendali Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro dan Kecil mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Penutup

Dari hasil temuan yang menegaskan bahwa TKPKD adalah sebuah *"Setting Institusional"*, tetapi sebagai sebuah organisasi yang ada di lingkup pemerintahan, organisasi penangulanga kemiskinan bersinergi dalam 4 bidang program terkait pengentasan kemiskinan, dan desain organisasi ini cenderung statis. Hasil penelitian ini menguraikan tugas kelompok kerja yang khusus menangani bidang Pendataan dan Sistem Informasi ; bidang Pengembangan kemitraan dan Bidang pengaduan masyarakat.

Dalam upaya mereduksi permasalahan yang ada, maka di bentuk pula tim pengendali program masing masing ; Pengendali Program Perlindungan dan Bantuan Sosial; Pengendalian Program Pemberdayaan masyarakat dan Pengendali Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya redesain kelembagaan organisasi penanggulangan kemiskinan sebagai satu-satunya lembaga organisasi pemerintah yang resmi untuk merekontruksi persoalan utama pengentasan kemiskinan di Kota kendari dan umumnya di Indonesia dalam suatu struktur organisasi yang terkoordinasi baik antar sektor maupun antar program melalui organisasi yang sudah terbentuk dengan tugas fungsional tersebut.

Daftar Pustaka

Djatnika, Dikcy Ustama, 2009, *Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan,* Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik (*JIAKP), Vol. 6, No. 1, Januari 2009:1-12*

Goldsmith, Stephen and Donald F.Kettel (editor), (2009), *Unlocking The Power Of Network: Keys To the Hight Performance Government*, ash institute for Democratic governance and innovation *John F. Kennedy School of Government Harvard University, B*rookings institution press *Washington, D.C.*

Kasmad, Rulinawaty, 2015. *Jaringan Pengembangan Kapasitas Organisasi Publik, Studi Kasus Penguatan Organisasi Terintegrasi dalam Implmentasi Kebijakan PKL di Kota Makassar,* Makalah disajikan pada Seminar Nasional IAPA Sulselbar, 6-7 April 2015.

Robbins, Stephen P., 1995. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi.* Jakarta: Arcan.

Tribrata, Joko, 2015, "*Redesigning Poverty Alleviation Organization in Kendari, Jurnal Internasional Journal of Public Administration and Governance,* Doi: 10.5296/ jpag. v5i3.8078. Volume 5, Nomor 3 Tahun 2015, Hal 10-20

Tribrata, Joko, 2017, *Model Poverty Based Collaboration Disampaikan Pada International Conferences,* "Scientific Publication Toward Global Competitive Higher Education. 21 –22 Januari 2017, UNM Makassar.

Tribrata, Joko, 2018, *Program Effectiveness Poverty Reduction in the Context of Integrity,* Prosiding Seminar yang Disampaikan Pada International Conference on Enviromental Awareness, 9 –11 Maret2018, ICEASD Kendari.

Tribrata, Joko, 2018, *Program Poverty Alleviation Through the Program Slums in the City of Kendari,* Jurnal Internasional Enviromnet and Ecology, URL: https://doi.org/10.5296/jee.v9i2.14388. Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018. Hal. 35-42